

L K A I P N O E R R A J N A

TAHUN 2022



**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

U. LINTAS SIRIHILAN, GUNUNG
TUA KM. 8 JANJOBI LIMA





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

JL. LINTAS SIBUHUAN – RIAU KM - SIBUHUAN 22763

E-mail : inspektoratkabpalas@gmail.com

Sibuhuan, 30 Januari 2022

Nomor : 786/195/2022
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada
Dinas Perikanan Kab Padang Lawas
TA 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal dan
 - e. Evaluasi atas Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat keberhasilan :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	81 - 100	Memuaskan
2	B	66 - 80	Baik
3	C	0 - 65	Cukup

pada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN, memperoleh nilai sebesar 82,85 (Delapan puluh dua koma delapan puluh lima) dengan sebutan Memuaskan.

5. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN menunjukkan :

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- a) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
- b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja dan Anggaran.
- d) Renstra sudah berorientasi hasil dan telah bersifat Spesific, Relevan.
- e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan , DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN dan sudah menetapkan rencana aksi atas kinerja dengan mencantumkan target secara periodik.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan RKT disusun setelah RKA dan telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja, telah menyajikan IKU.
- b) Sasaran yang ditetapkan sudah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja belum ditetapkan dengan baik.
- d) Dokumen RKT sudah selaras dengan dokumen RPJMD/ Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Kabupaten Padang Lawas telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
- b) Dokumen PK selaras dengan dokumen IKU dan Dokumen RKT, dan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- c) Target kinerja yang masuk dalam perjanjian kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN menunjukkan :

- 1) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja secara memadai berupa SOP.
- 2) IKU yang disusun dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil yang relevan dengan kondisi yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur kinerja.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif dengan menggambarkan hasil yang relevan.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah didukung dengan dokumen hasil monitoring.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu namun belum terdokumentasi secara cukup memadai.

- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala namun belum terdokumentasi secara memadai.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN menunjukkan bahwa :

- 1) Laporan Kinerja telah disusun dan tidak terdapat kelemahan pada ringkasan eksekutif secara prinsip mengenai informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 2) Laporan Kinerja disusun telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, pencapaian IKU, informasi kinerja yang telah diperjanjikan, informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan telah membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi program nasional yang terkait dengan pencapaian kinerja untuk dapat diandalkan.
- 3) Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam perbaikan peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Pemenuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Tahun 2022, telah ditetapkan sebagai ukuran kinerja secara formal.

- 2) Kualitas evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN tahun 2022, dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil yang ingin dicapai, terdapat kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.

- 3) Pemanfaatan evaluasi

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program-program, hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan namun belum didokumentasikan.

e. Pencapaian Sasaran.

- 1) Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT).

Dalam DPA tahun anggaran 2022, ditetapkan anggaran Belanja langsung DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

2) Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME).

Pencapaian sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis tahun 2022 Tidak melebihi target yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 (lima belas) indikator kinerja utama pada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN dengan rincian sebagai berikut :

- a) Terdapat 11 Indikator Kinerja yang mencapai target
- b) Terdapat 4 Indikator Kinerja yang belum mencapai target
- c) Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan program nasional

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Supaya menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan program nasional
- b. Supaya membuat capaian kinerja secara berkala

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

INSPEKTUR KAB PADANG LAWAS
INSPEKTORAT
HARJUSLI FAHRI STREGAR, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770820 199511 1 001

**KERTAS KERJA REVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS**

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN							Catatan	Daftar Evidence
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit / Satker		Nilai			
			Jawaban					
		30,00			25,60			
1	PERENCANAAN KINERJA	6,00			6,00			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia		A		1,00			
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja		A		1,00			
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang		A		1,00			
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah		A		1,00			
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek		A		1,00			
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja		A		1,00			
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja							
	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain	9,00			8,80			
1.b								
	(crosscutting)				0,82			
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan		A		0,82			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu		B		0,60			
	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja		A		0,82			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja sebenarnya yang perlu dicapai		A		0,82			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai		A		0,82			
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART							
	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan Strategis)		A		0,82			
5	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis							
7			A		0,82			

8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		A	0.82	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		A	0.82	
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		A	0.82	
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		A	0.82	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		10.80	
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		A	1.8	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		A	1.8	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.		B	0.9	
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		B	0.9	
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		A	1.8	
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisinya yang lebih baik.		A	1.8	
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		B	0.9	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		B	0.9	
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		23.30	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00		6.00	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		A	2.00	
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		A	2.00	
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		A	2.00	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00		6.80	

1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian	A	1.2	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	A	1.2	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	A	1.2	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	A	1.2	
5	Setiap level organisasi melakukan penantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	A	1.2	
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	C	0.4	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	C	0.4	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		10.50	15.00
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	C	0.5	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	C	0.5	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	C	0.5	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	A	1.5	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	A	1.5	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	A	1.5	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	A	1.5	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	B	1.0	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	1.0	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	1.0	
3	PELAPORAN KINERJA		13.31	15.00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja		2.40	3.00
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	A	0.5	

2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			C	0.2	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			A	0.5	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.			A	0.5	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			C	0.2	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			A	0.5	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan.	4.50			4.5	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			A	0.5	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			A	0.5	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			A	0.5	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			A	0.5	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			A	0.5	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			A	0.5	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			A	0.5	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			A	0.5	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			A	0.5	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7.50			6.41	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			A	1.1	
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			B	0.8	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			B	0.8	

4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				0.8	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			A	1.1	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			A	1.1	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			B	0.8	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00			20.64	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00			3.94	
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			A	1.87	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			A	1.67	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			C	0.6	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50			6.0	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			A	1.5	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			A	1.5	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			B	1	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			A	1.5	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			C	0.5	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50			10.70	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diindaklanjuti.			A	2.5	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.			A	2.5	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			A	2.5	

4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		B	1.6	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		B	1.6	
Jumlah		100		82.85	

DISETUJUI,
INSPEKTUR KABUPATEN PADANG LAWAS



HARJUSYAHRI SIREGAR, S.Sos, M.P.
NIP. 19740820 199511 1 001

TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. TRI HENDRA APRIA DINATA

2. TAMRIN HASIBUAN

3. MUHAMMAD PRAYOGIA

4. RAHMA SARI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan perkenaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas merupakan dokumen yang berisi gambaran umum tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas adalah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat dan memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Padang Lawas disamping memberi masukan guna memperbaiki program perencanaan pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas ini mengacu kepada :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja.

Selain mengacu kepada petunjuk tersebut di atas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas dan dokumen perencanaan lainnya.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas ini disusun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Janjilobi Lima, Desember 2022
Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan
Kabupaten Padang Lawas



AGUS SALIM HASIBUAN, S.Pt
PEMBINA Tk. I
NIP. 19770516 200502 1 001



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan	37
2. Formulir Penetapan Kinerja	38
3. Formulir Pengukuran Kinerja	39



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada *good governance*. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh.

Good Governance memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian *good governance* ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan yang dimaksud harus berupa pertanggungjawaban secara anggaran, dan yang paling utama pertanggung jawaban dalam bentuk kinerja. Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 melaksanakan 4 (empat) program yang diuraikan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp. 4.157.269.279,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.031.344.557,00 atau 96,97 %. Jumlah anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai beberapa target



indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan, dimana turunannya dibuat Renja sebagai target tahunan.

Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas, sehingga tujuan dan sasaran utama dinas tercapai.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini disajikan beberapa pokok yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas yang diamanatkan oleh Bupati Padang Lawas telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas beserta seluruh pejabat dan staf telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada poin 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator keberhasilan.

Janjilobi Lima, Desember 2022

Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan
Kabupaten Padang Lawas



AGUS SALIM HASIBUAN, S.Pt
PEMBINA Tk. I
NIP. 19770516 200502 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dan Tugas Dekonsentrasi oleh pemerintah atasan dalam bidang perikanan dan peternakan. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas No. 39 Tahun 2016. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan dan peternakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan atau pembenihan perikanan dan peternakan
2. Pengaturan dan pengawasan Balai Benih Ikan (BBI)
3. Penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi dari teknis izin usaha yang bergerak pada bidang perikanan dan peternakan, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi
4. Pengelolaan Laboratorium Benih Ikan
5. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi ikan

6. Penyelenggaraan penanggulangan wabah, hama dan penyakit menular dalam lingkup perikanan dan peternakan
7. Pelaksanaan pengujian mutu hasil dalam lingkup perikanan dan peternakan
8. Penyelenggaraan penggunaan air organisasi
9. Penetapan dan pemanfaatan lahan perikanan dan peternakan
10. Penyusunan rencana perikanan dan peternakan Kabupaten
11. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten
12. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang perikanan dan peternakan secara umum
13. Pengkajian dan penerapan teknologi perikanan dan peternakan
14. Pendayagunaan dan pengelolaan sumberdaya alam
15. Pengadaan dan pembinaan perbenihan ikan, obat-obatan dan vaksin ternak
16. Pembinaan penggunaan alat, mesin dan tenaga kerja perikanan dan peternakan
17. Pembinaan manajemen usaha dan pembinaan teknis perikanan dan peternakan
18. Pembinaan panen, pasca panen, pengelolaan hasil dan pemasaran
19. Pengelolaan data statistik
20. Pemanfaatan produksi dan sarana produksi
21. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah
22. Penyelenggaraan dan pengawasan produksi pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil perikanan dan peternakan
23. Penyelenggaraan dan pengawasan proses pemberian rekomendasi dari teknis izin usaha dan industri primer perikanan dan peternakan
24. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan kawasan dan areal perikanan dan peternakan
25. Penyelenggaraan dan perencanaan pengelolaan pemanfaatan pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian areal perikanan dan peternakan
26. Penetapan kebijakan untuk mendukung kebijakan perikanan dan peternakan

27. Penyelenggaraan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
28. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang yang tidak berisiko tinggi
29. Penyelenggaraan promosi sektor perikanan dan peternakan
30. Pengawasan teknis terhadap seluruh pelaksanaan peraturan perundang-undangan
31. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang perikanan dan peternakan
32. Pengkajian terhadap penyediaan ikan dan ternak, distribusi ikan dan ternak, gizi serta penganeka ragam ikan dan ternak
33. Penganeka ragam sistem kewaspadaan ternak dan pengendalian mutu serta keamanan ternak
34. Pengawasan teknis terhadap seluruh pelaksanaan peraturan perundang-undangan
35. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang Perikanan dan Peternakan.

1.2. Struktur Organisasi

Susunan Kepegawaian Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan dan Peternakan di pimpin oleh seorang **Kepala Dinas**
2. Kesekretariatan Dinas Perikanan dan Peternakan di pimpin oleh seorang **Sekretaris** dengan dibantu oleh **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Perencana Ahli Muda**
3. Bidang **Perikanan** di pimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh **Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda; Pengendali Hama dan penyakit Ikan Ahli Muda; Analisis Budidaya Perikanan ; Analisis Potensi Perbenihan ; Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Analisis Mutu Hasil Perikanan**
4. Bidang **Peternakan** di pimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh **Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda; Ahli Pertama Medik Veteriner; Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas; Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit**

Hewan; Pengawas Mutu Bibit Ternak; Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Hewan dan Lainnya; Pengelola Rumah Potong Hewan

1.3. Komposisi SDM

Kondisi Sumber Daya Manusia , Sarana & Prasarana

1.3.1. Kondisi SDM.

Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1 .Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sarjana	23	Data Tahun 2022
2.	D III	2	Data Tahun 2022

- S1 Pertanian = 3 orang
- S1 Perikanan = 9 orang
- S1 Peternakan = 5 orang
- S1 Sosial, Hukum, Pendidikan dan Ekonomi = 4 orang
- Dokter Hewan = 2 orang
- D III = 2 orang

Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV b	1	Data Tahun 2022
2.	IV a	2	
3.	III d	4	
4.	III c	2	
5.	III b	3	
6.	III a	11	
7.	II c	2	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita setiap Warga Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008, pendayagunaan aparatur daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, dengan mempraktekkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi praktek KKN. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka diperlukan lembaga pemerintahan yang professional serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu perlu adanya visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dibawah ini adalah Visi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas:

"PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN"

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas adalah :

1. Mengoptimalkan potensi perikanan dan peternakan

2. Menumbuh kembangkan sentra-sentra produksi
3. Meningkatkan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam
4. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perikanan dan peternakan
2. Meningkatkan kualitas SDM perikanan dan peternakan yang mempunyai kemampuan menguasai teknologi perikanan dan peternakan secara tepat dan memadai untuk menjawab tantangan ke depan.
2. Meningkatkan produksi perikanan dan peternakan melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dalam rangka mencapai optimalisasi produktivitas untuk mendukung percepatan swasembada hewani.
3. Mengembangkan usaha perikanan dan peternakan secara luas ke arah Agribisnis dengan melakukan terobosan dan pengembangan produksi perikanan dan peternakan yang berorientasi pada industri yang berbasis perikanan dan peternakan.
4. Meningkatkan koordinasi dan akses petani ikan dan peternak dengan instansi terkait terhadap permodalan, sumber bahan baku dan pasar hasil-hasil perikanan dan peternakan.
5. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama lintas Kabupaten (luar daerah) dan masyarakat swasta dalam mendukung usaha perikanan dan peternakan skala besar.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada

kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perikanan dan peternakan

Strategi : Peningkatan nilai tambah produk perikanan dan peternakan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Pembinaan produk unggul daerah

Sasaran 2: Menjamin ketersediaan pangan

Strategi : Mendayagunakan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang cukup dan efisien.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Pengamanan ketahanan pangan perikanan secara berkelanjutan dengan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi sesuai dengan potensi wilayah.
- b) Peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dan peternakan.

Sasaran 3: Meningkatnya jumlah produksi perikanan.

Strategi : Pembangunan sarana dan prasarana perikanan meliputi pembangunan dan rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI), perluasan lahan perikanan, pencegahan konversi lahan, pengembangan usaha-usaha perikanan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Pengamanan ketahanan pangan perikanan secara berkelanjutan dengan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi sesuai dengan potensi wilayah.
- b) Peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan.

Sasaran 4: Meningkatnya populasi ternak di Kabupaten Padang Lawas

Strategi : Kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna, yang diarahkan untuk; (a) merespon permasalahan dan kebutuhan pengguna; (b) mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya peternakan spesifik lokasi; (c) pengembangan produk berdaya saing; (d) penyelarasan dan integrasi dengan penguasaan IPTEK peternakan; dan (e) percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan penjangkaran umpan balik inovasi peternakan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Pengamanan ketahanan pangan peternakan secara berkelanjutan dengan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi sesuai dengan potensi wilayah.
- b) Peningkatan populasi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan.

Sasaran 5: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dan petani pembudidaya ikan dan peternak

Strategi : Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM Perikanan dan Peternakan, yang diarahkan untuk; (a) menyusun kebijakan pembinaan, pendampingan, pelatihan perikanan dan peternakan; (b) peningkatan peran serta masyarakat; (c) penyelenggaraan pembinaan perikanan dan peternakan bagi petani pembudidaya ikan dan peternak; dan (d) pengembangan kelembagaan perikanan dan peternakan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Peningkatan kemampuan petani pembudidaya ikan dan peternak dan penguatan lembaga pendukungnya.

4. SASARAN STRATEGIS

- a) Meningkatnya jumlah produksi perikanan
- b) Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak

5. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG DILAKSANAKAN TA. 2022

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- III. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota
- IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diadakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas (pihak kesatu) dan Bupati Padang Lawas (pihak kedua). Dimana pihak kesatu pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kesatu. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabel 4. Target Kinerja Yang Akan Dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja IKK Outcome	IKK Output	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya jumlah produksi perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (Ton)		4.127	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	148.537.730
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10	1) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil a. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	
		2. Persentase tempat pelelangan		2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan a. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan	59.902.640

		ikan yang operasional (%)	0	ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1		
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluh dan pendamping/kemitraan usaha/ kemudahan akses IPTEK dan Informasi/ dan Penguatan kelembagaan) (Orang)	15		
		5. Jumlah Benih Budidaya air tawar dan air payau di produksi (Ekor)	1.550.000		

Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak	1. Populasi ternak (Ekor)	1. Kerbau (Ekor)	8.644	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.326.748.660
		2. Sapi (Ekor)	18.806		
		3. Kambing (Ekor)	15.856		
		4. Ayam kampung (Ekor)	160.216		
		5. Itik Petelur (Ekor)	9.428		
	2. Konsumsi Daging	1. Konsumsi Ternak Besar (kg)	2,3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	59.990.000
		2. Konsumsi Ternak kecil (kg)	1,6		
		3. Konsumsi ternak unggas (kg)	2,0		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini akan menguraikan lebih jelas pencapaian sasaran utama peningkatan produksi perikanan dan peternakan dan pengukuran pencapaian indikator kinerja masing-masing program pada tahun 2022 serta pengungkapan secara ringkas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja berikut realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan per program.

A. Pencapaian Sasaran Utama Peningkatan Produksi Perikanan dan Peternakan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan melalui kegiatan/program adalah meningkatkan produksi perikanan dan peternakan melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dalam rangka mencapai optimalisasi produktivitas untuk mendukung program percepatan swasembada daging dan peningkatan produksi serta konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sangat baik untuk menciptakan generasi muda yang lebih cerdas, melalui pencapaian target sasaran utama di tahun 2022 yaitu :

- ❖ Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (upaya intensifikasi)
Untuk tahun anggaran 2022 data pembangunan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (Upaya Intensifikasi)

Pengembangan Sarana dan Prasarana	Lokasi	Pagu Dana (Rp)	Sumber Dana
Pengembangan Kapasitas pembudidaya Ikan Kecil	1. Kelompok Tani Mutiara Hati Desa Hutaibus	148.537.730	DAU

	Kecamatan Lubuk Barumun 2. Kelompok Tani Barokah Desa Hasatan Julu Kecamatan Barumun Baru 3. Kelompok Tani Usaha Sejahtera Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun		
--	--	--	--

Dilihat dari tabel 5 diatas untuk tahun anggaran 2022 upaya intensifikasi dalam peningkatan produksi perikanan dana yang tersedia masih dialokasikan pada pemberian bantuan benih ikan, pakan yang bertujuan untuk peningkatan produksi ikan di Kabupaten Padang Lawas. Dengan meningkatnya produksi ikan di Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ikan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas. Dari tabel 5 dapat dilihat juga bahwa sumber dana kegiatan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas tidak memperoleh dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk tahun anggaran 2023 sangat dibutuhkan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung program/kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas.

B. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Dalam LKjIP Tahun Anggaran 2022 ini, penjelasan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pencapaian indikator kinerja masing-masing program terhadap target yang ditetapkan, disertai penjelasan analisa kecenderungan pencapaian indikator kinerja sejak tahun 2019, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta penjelasan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing program secara keseluruhan.

Untuk mengukur tingkat persen capaian indikator kinerja dari masing-masing program, maka dilakukan pengkategorian capaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Kurang (warna merah) : bila persen capaian kerja < 60%
2. Kategori Kurang (warna merah hati) : bila persen capain kinerja 60%-75%
3. Kategori Sedang (warna kuning) : bila persen capaian kinerja 75%-90%
4. Kategori Baik (warna hijau) : bila persen capaian kinerja > 90%

I. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 6 (enam) indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Pengelolaan Budidaya yang harus dicapai pada tahun 2022, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2022

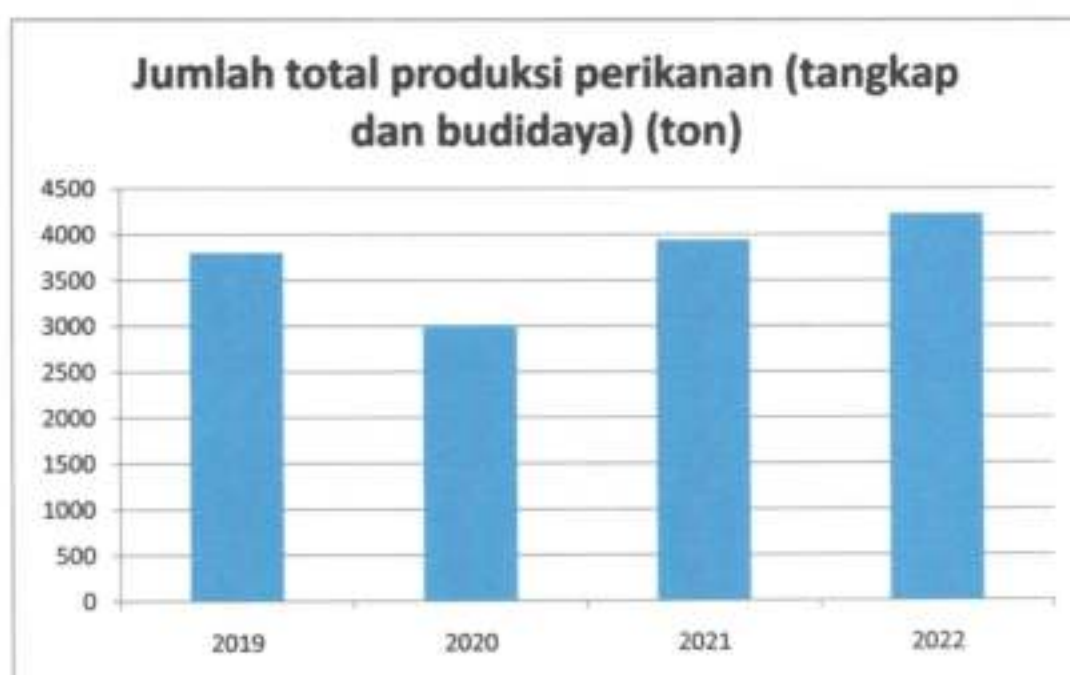
NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	% CAPAIAN
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	4.127 Ton	4.223,69 Ton	102,3%
2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10 RTP	10 RTP	100%
3	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	0 %	0 %	100%
4	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu)	1 IUP	1 IUP	100%

	Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan			
5	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluh dan pendamping/kemitraan usaha/ kemudahan akses IPTEK dan Informasi/ dan Penguatan kelembagaan)	15 orang	25 orang	166,7%
6	Jumlah Benih Budidaya air tawar dan air payau di produksi (ekor)	1.550.000 ekor	1.995.650 ekor	128,8%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ke-enam indikator berkategori BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2019, adalah sebagai berikut:

➤ Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) (ton)

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)
2019	3.800
2020	3.010,52
2021	3.937,66
2022	4.223,69



Dari grafik diatas dapat dilihat peningkatan jumlah produksi ikan budidaya air tawar di Kabupaten Padang Lawas. Tahun 2019 ada penurunan target produksi perikanan dikarenakan adanya kemarau dan perbaikan irigasi.

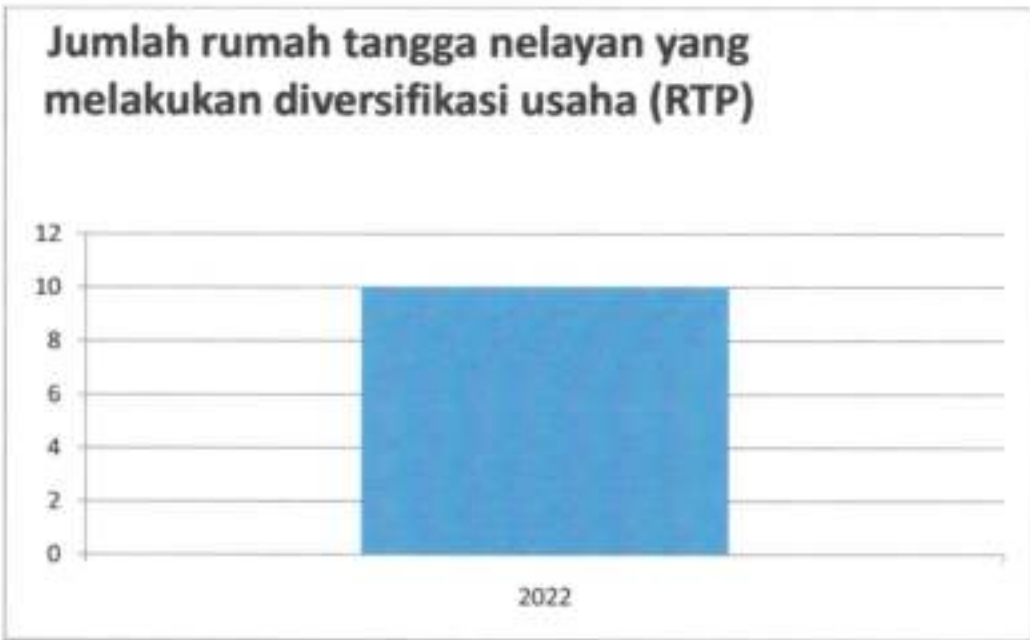
Untuk Tahun 2020 ada penurunan produksi perikanan disebabkan oleh kurangnya bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan karena adanya pengurangan pagu anggaran untuk dana COVID 19.

Untuk tahun 2020 ada peningkatan produksi perikanan air tawar dikarenakan adanya stimulan bantuan benih ikan dan pakan untuk budidaya perikanan dan lubuk larangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk tahun 2022 terdapat pertambahan jumlah total produksi perikanan sedikit, yaitu menjadi 4.223,69 ton.

➤ Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)

Tahun	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)
2022	10 RTP



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) sebanyak 10 RTP yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

- Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional (%)

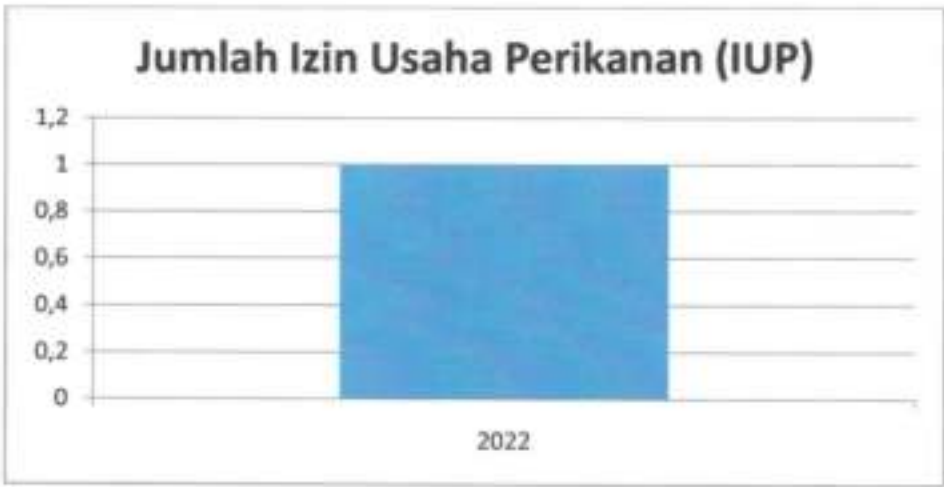
Tahun	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional (%)
2022	0 %



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase tempat pelelangan ikan yang operasional (%) 0. Karena Kabupaten Padang Lawas tidak memiliki tempat pelelangan ikan.

- Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan

Tahun	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
2022	1 IUP



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) yang ada di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1.

- Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluh dan pendamping/kemitraan usaha/ kemudahan akses IPTEK dan Informasi/ dan Penguatan kelembagaan)

Tahun	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluh dan pendamping/kemitraan usaha/ kemudahan akses IPTEK dan Informasi/ dan Penguatan kelembagaan)
2022	25 orang



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluh dan pendamping/kemitraan usaha/ kemudahan akses IPTEK dan Informasi/ dan Penguatan kelembagaan) sebanyak 25 orang.

- Jumlah Benih Budidaya air tawar dan air payau di produksi (ekor)

Tahun	➤ Jumlah Benih Budidaya air tawar dan air payau di produksi (ekor)
2022	1.995.650 ekor



II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang harus dicapai pada tahun 2022 dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2022

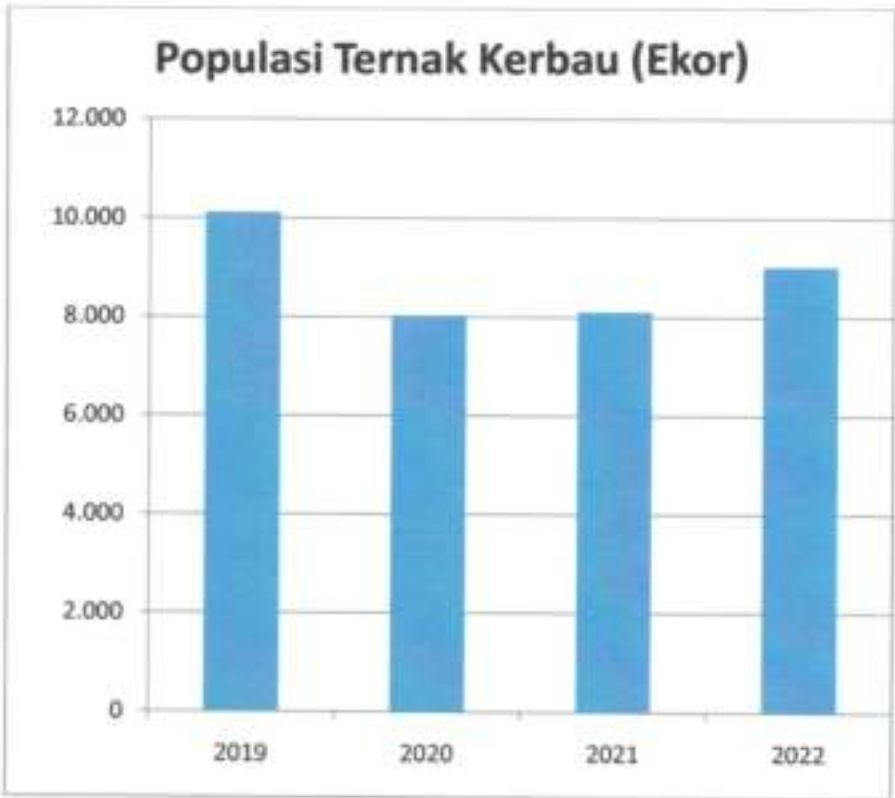
NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	% CAPAIAN
1	Populasi ternak kerbau	8.644 Ekor	9.027 Ekor	104,4 %
2	Populasi ternak sapi	18.806 Ekor	19.114 Ekor	101,6 %
3	Populasi ternak kambing	15.856 Ekor	15.613 Ekor	98,5 %
4	Populasi ternak domba	8.504 Ekor	8.950 Ekor	105,2 %
5	Populasi ternak ayam kampung	160.216 Ekor	162.563 Ekor	101,5 %
6	Populasi ternak itik petelur	9.428 Ekor	9.802 Ekor	104 %
7	Konsumsi ternak besar	2,3 Kg	2,21 Kg	96,1 %
8	Konsumsi ternak kecil	1,6 Kg	1,50 Kg	93,8 %
9	Konsumsi ternak unggas	2,0 Kg	2,14 Kg	107 %

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 9 indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner **semua** indikator berkategori BAIK.

Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian adalah sebagai berikut:

➤ Populasi ternak kerbau

Tahun	Jumlah (ekor)
2019	9.569
2020	8.027
2021	8.104
2022	9.027



Untuk tahun 2019 populasi ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 9.569 ekor.

Untuk Tahun 2020 populasi ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 8.027 ekor. Populasi ternak kerbau berkurang disebabkan karena berkurangnya lahan penggembalaan kerbau karena ditanami tanaman perkebunan.

Untuk tahun 2022 pertumbuhan populasi ternak kerbau mengalami penambahan jumlah populasi sedikit, jumlah populasi kerbau untuk tahun 2022 sebanyak 9.027 ekor.

➤ Populasi ternak sapi

Tahun	Jumlah (Ekor)
2019	10.113
2020	13.360
2021	18.222
2022	19.114



Untuk tahun 2019 populasi ternak sapi di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 10.113 ekor.

Untuk Tahun 2022 populasi ternak sapi di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 18.222 ekor. Ada peningkatan populasi dari Tahun 2019 disebabkan karena adanya Program Nasional Layanan Kawin Suntik Sapi / Inseminasi dan bantuan sapi dari APBD Provinsi (Tahun 2019). Untuk tahun 2022 ada peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 19.114 ekor.

➤ Populasi ternak kambing

Tahun	Jumlah (ekor)
2019	14.928
2020	15.375
2021	15.286
2022	15.613

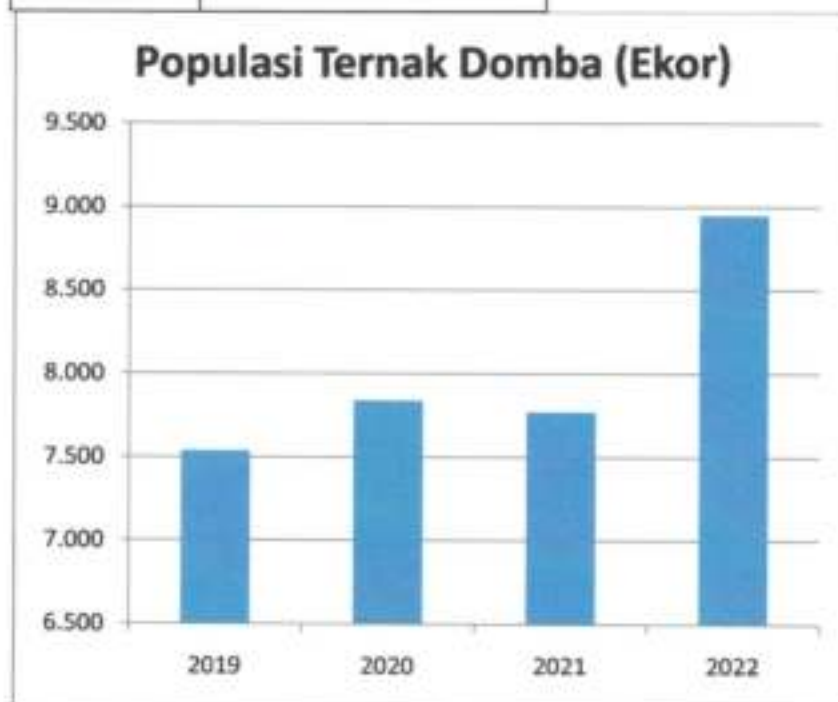


Untuk tahun 2019 populasi ternak kambing di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 14.928 ekor. Untuk Tahun 2020 populasi ternak kambing di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 15.375 ekor. Ada peningkatan populasi dari Tahun 2019 karena adanya bantuan ternak kambing dari APBD Provinsi.

Untuk tahun 2021 populasi ternak kambing sebesar 15.286 ekor, ada penurunan dari populasi tahun 2020. Untuk tahun 2022 populasi ternak kambing mengalami peningkatan menjadi 15.613 ekor.

➤ Populasi ternak Domba

Tahun	Jumlah (ekor)
2019	7.537
2020	7.838
2021	7.771
2022	8.950

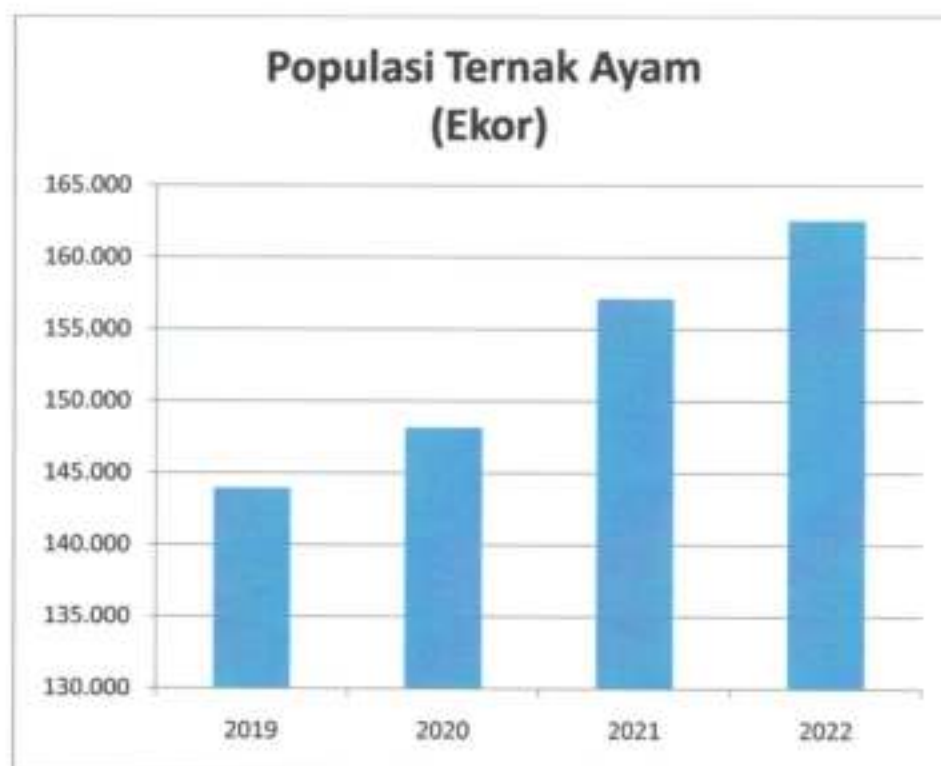


Untuk tahun 2019 populasi ternak domba di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 7.537 ekor. Untuk tahun 2020 populasi ternak domba di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 7.838 ekor. Ada peningkatan populasi dari Tahun 2019 karena adanya bantuan ternak kambing dari APBD Provinsi.

Untuk tahun 2021 populasi ternak domba sebesar 7.771 ekor, ada penurunan dari populasi tahun 2020. Untuk tahun 2022 populasi ternak domba mengalami peningkatan menjadi 8.950 ekor.

➤ Populasi ternak Ayam Kampung

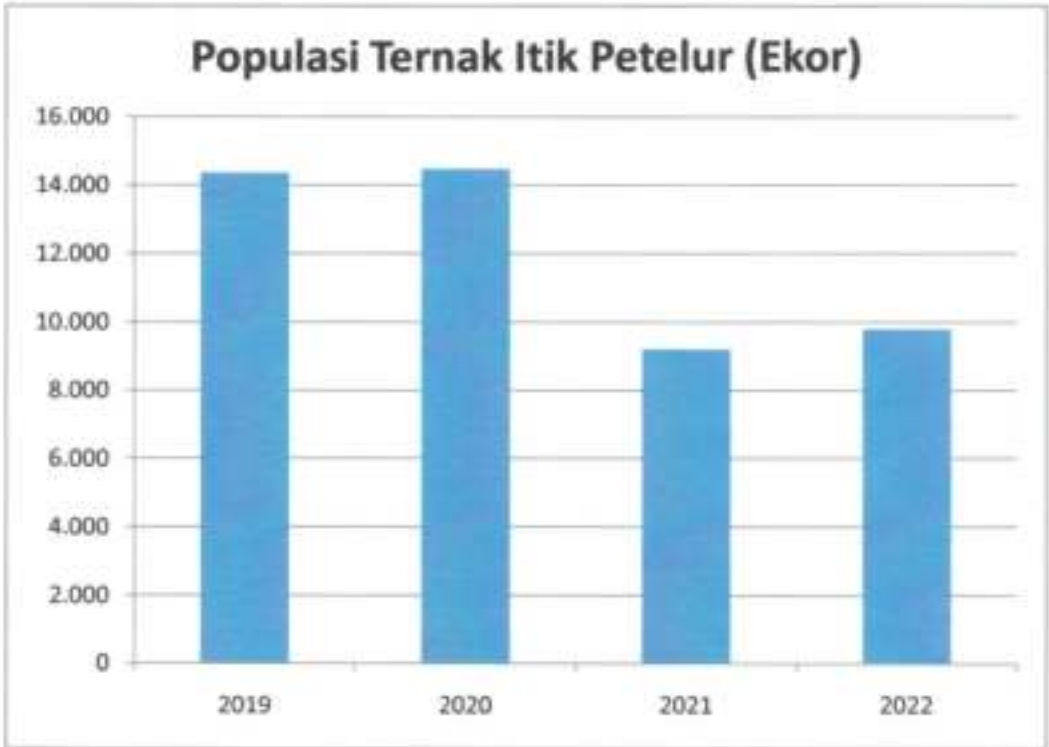
Tahun	Jumlah (ekor)
2019	143.937
2020	148.152
2021	157.136
2022	162.563



Untuk tahun 2019 populasi ternak ayam di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 143.937 ekor. Untuk tahun 2021 populasi ternak ayam di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 157.136 ekor. Ada peningkatan populasi dari Tahun 2019 karena adanya bantuan ternak ayam dari APBD Provinsi. Untuk tahun 2022 populasi ayam kampung mengalami peningkatan menjadi 162.563 ekor.

➤ Populasi ternak Itik Petelur

Tahun	Jumlah (ekor)
2019	14.362
2020	14.467
2021	9.207
2022	9.802



Untuk tahun 2019 populasi ternak itik di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 14.362 ekor. Untuk tahun 2020 populasi ternak itik di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 14.467 ekor. Untuk tahun 2021 populasi ternak itik sebesar 9.207 ekor, ada peningkatan dari populasi tahun 2020, karena ada bantuan itik dari APBD Kabupaten Padang Lawas. Untuk tahun 2022 populasi ternak itik petelur meningkat menjadi 9.802 ekor.

➤ Konsumsi Ternak Besar

Tahun	Jumlah Konsumsi(Kg)
2019	2,3
2020	2,1
2021	2,25
2022	2,21



Untuk tahun 2019 konsumsi ternak besar di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,3 Kg. Untuk tahun 2020 konsumsi ternak besar di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,1 Kg. Adanya pengurangan tingkat konsumsi disebabkan efek COVID 19 sehingga daya beli masyarakat menurun. Untuk tahun 2021 ada peningkatan konsumsi untuk ternak besar menjadi 2,25 kg. Untuk tahun 2022 konsumsi ternak besar adalah 2,21 Kg.

➤ Konsumsi Ternak Kecil

Tahun	Jumlah Konsumsi(Kg)
2019	2,4
2020	2,3
2021	1,57
2022	1,50



Untuk tahun 2019 konsumsi ternak kecil di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,4 Kg.

Untuk tahun 2020 konsumsi ternak kecil di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,3 Kg.

Untuk tahun 2021 konsumsi ternak kecil di Kabupaten Padang Lawas sebesar 1,57 Kg. Adanya pengurangan tingkat konsumsi disebabkan efek COVID 19 sehingga daya beli masyarakat menurun. Untuk tahun 2022 konsumsi ternak kecil sebesar 1,50 Kg.

➤ Konsumsi Ternak Unggas

Tahun	Jumlah Konsumsi(Kg)
2019	4,1
2020	2,8
2021	1,90
2022	2,14



Untuk tahun 2019 konsumsi ternak unggas di Kabupaten Padang Lawas sebesar 4,1 Kg. Untuk tahun 2020 konsumsi ternak unggas di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,8 Kg. Untuk tahun 2021 konsumsi ternak unggas di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,19 Kg. Adanya pengurangan tingkat konsumsi disebabkan efek COVID 19 sehingga daya beli masyarakat menurun. Untuk tahun 2022 konsumsi ternak unggas di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2,14 Kg.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja. Untuk mengukur tingkat persen capaian indikator kinerja dari masing-masing program, maka dilakukan pengkategorian capaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Kurang (warna merah): bila persen capaian kerja < 60%
2. Kategori Kurang (warna merah hati) : bila persen capain kinerja 60%-75%
3. Kategori Sedang (warna kuning) : bila persen capaian kinerja 75-90%.
4. Kategori Baik (warna hijau) : bila persen capaian kinerja > 90%.

Berdasarkan hasil evaluasi dari 15 (lima belas) indikator kinerja bahwa ke lima belas (15) indikator berkategori BAIK. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas sudah cukup baik dan masih diperlukan perbaikan kedepannya terutama dukungan dana APBD dan SDM.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik dan yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis adalah kurangnya/minimnya dana alokasi umum (DAU) dan SDM yang dialokasikan ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas.

Demikian penyusunan LKJIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan LKjIP ini, dan diharapkan adanya saran-saran yang bersifat membangun dari semua pihak baik didalam penyempurnaan penyusunan LKjIP ini maupun didalam pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Janjilobi Lima, Desember 2022

**Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan
Kabupaten Padang Lawas**



AGUS SALIM HASIBUAN, S.Pt

Pembina TK.I

NIP. 19770516 200502 1 001

LAMPIRAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PADANG LAWAS

TAHUN : 2022

SASARAN STRATEGIS	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	TARGET
Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) (ton)		4.127
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)	0
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluh dan pendamping/kemitraan usaha/kemudahan akses IPTEK dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (orang)	15
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi (Ekor)	1.550.000
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH		TARGET
Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak	1. Populasi Ternak	1. Kerbau (Ekor)	8.644
		2. Sapi (Ekor)	18.806
		3. Kambing (Ekor)	15.856
		4. Domba (Ekor)	8.504
	2. Konsumsi Daging	5. Ayam kampung (Ekor)	160.216
		6. Itik petelur (Ekor)	9.428
		7. Konsumsi ternak besar (Kg)	2,3
		8. Konsumsi ternak kecil (Kg)	1,6
		9. Konsumsi ternak unggas (Kg)	2,0

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) (ton)		4.127	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	268.527.730,00
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	148.537.730,00
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)	0	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	148.537.730,00
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	59.990.000,00
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendamping/kemitraan usaha/kemudahan akses IPTEK dan informasi/atau penguatan kelembagaan) (orang)	15	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	59.990.000,00
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi (Ekor)	1.550.000		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak	1. Populasi Ternak	1. Kerbau (Ekor)	8.644	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.326.748.860,00
		2. Sapi (Ekor)	18.806	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Kabupaten/kota Lain	1.326.748.860,00
		3. Kambing (Ekor)	15.856	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/kota Lain	1.326.748.860,00
		4. Domba (Ekor)	8.504	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	59.990.000,00

	5. Ayam kampung (Ekor)	160.216	Penjaminan Kesehatan Hewan, Perubatan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.990.000,00
	6. Itik petekur (Ekor)	9.428	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	59.990.000,00
2. Konsumsi Daging	7. Konsumsi ternak besar (Kg)	2,3		
	8. Konsumsi ternak kecil (Kg)	1,6		
	9. Konsumsi ternak unggas (Kg)	2,0		

Jumlah Anggaran :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Rp.

3.010.562.780,00

JANJILABI LIMA, DESEMBER 2022


 AHMAD ZAHAWI PASARIBU, C.HI,MM,M.SI,MH


 KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS
 AGUS SALIM HASIBUAN, S.Pi
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
 NIP.19770516.200502 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD
TAHUN

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
2022

SASARAN STRATEGIS	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) (ton)		4.127	2.784,51	67,5
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10	10	100,0
		2. Persentase Tempat Pelelangan ikan yang operasional (%)	0	0	100,0
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1	1	100,0
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendamping/kemitraan usaha/kemudahan akses IPTEK dan informasi dan penguatan kelembagaan) (orang)	15	25	166,7
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi (Ekor)	1.550.000	1.995.650	128,8
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH		TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak	1. Populasi Ternak	1. Kerbau (Ekor)	8.644	9.027	104,4
		2. Sapi (Ekor)	18.806	19.114	101,6
		3. Kambing (Ekor)	15.856	15.613	98,5
		4. Domba (Ekor)	8.504	8.950	105,2
		5. Ayam kampung (Ekor)	160.216	162.563	101,5
		6. Itik petelur (Ekor)	9.428	9.802	104,0
	2. Konsumsi Daging	7. Konsumsi ternak besar (Kg)	2,3	2,21	96,1
		8. Konsumsi ternak kecil (Kg)	1,6	1,50	93,8
		9. Konsumsi ternak unggas (Kg)	2,0	2,14	107,0

Jumlah Total Anggaran Tahun 2022 : Rp. 4.157.269.279,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp. 4.031.344.557,00

SILPA Anggaran Tahun 2022 : Rp. 125.924.722,00